

## Resmikan Gedung Majelis Ulama Indonesia Kabupaten Hulu Sungai Utara, Penjabat Bupati dan Bupati Terpilih Kompak Harapkan Hulu Sungai Utara Lebih Islami



Sumber gambar:

<https://banjarmasin.tribunnews.com/2025/01/30/resmikan-gedung-mui-kabupaten-hsu-pj-bupati-dan-bupati-terpilih-kompak-harapkan-hsu-lebih-islami>

Penjabat (Pj) Bupati Hulu Sungai Utara (HSU) Drs. H. Zakly Asswan, MM meresmikan gedung baru Majelis Ulama Indonesia (MUI) Kabupaten Hulu Sungai Utara, Kamis (30/1/2025).

Hadir dalam kegiatan tersebut Pj. Bupati HSU Drs. H. Zakly Asswan, Sekda HSU H. Adi Lesmana, S.Sos, M.Si, Ketua MUI HSU KH. Said Masrawan, Lc, Bupati dan Wakil Bupati HSU terpilih H. Sahrujani dan Hero Setiawan, Ketua DPRD HSU dan Jajaran Forkopimda, Plh Kepala Kantor Kemenag, Ketua LPTQ HSU H. Husairi Abdi, Lc, Ketua BKPRMI HSU, Ketua PWRI HSU serta Kepala SKPD di lingkup Pemkab HSU.

Dalam kesempatan tersebut, Pj Bupati HSU Zakly Asswan menyampaikan bahwa pembangunan gedung tersebut sebagai wujud impian dan harapan bersama untuk memiliki kantor yang representatif dalam mensyiarkan islam.

Zakly meminta MUI untuk terus bersinergi dengan Pemerintah Daerah dalam merumuskan dan menyelesaikan berbagai persoalan, karena fatwa MUI sangat dibutuhkan apabila terjadi permasalahan di tengah - tengah umat.

"Dengan adanya gedung MUI ini, diharapkan Kabupaten HSU ada dalam keberkahan dan keridhoan Allah SWT, "ujarnya.

Sementara itu, Ketua MUI HSU KH. Said, Masrawan, Lc menyampaikan apresiasi dan ucapan terima kasih kepada Pemerintah Kabupaten HSU yang telah menghibahkan dan merealisasikan pembangunan gedung baru MUI HSU.

"Terbangunnya gedung MUI berkat dukungan dari Pemkab HSU, DPRD HSU dan juga Dinas PU, semoga MUI kedepan terus menjadi garda terdepan dalam mengatasi berbagai permasalahan umat, "pungkasnya.

Said Masrawan juga menambahkan pembangunan Gedung MUI ini merupakan usulan daripada Ketua LPTQ HSU, Ketua BKPRMI HSU, Ketua PWRI HSU dan juga MUI HSU yang kemudian ditindak lanjuti oleh Pj. Bupati HSU Zakly Asswan bersama DPRD HSU hingga akhirnya direalisasikan.

Adapun Bupati HSU Terpilih H. Sahrujani turut mendukung pembangunan Gedung baru MUI HSU ini, H. Sahrujani selaku Bupati HSU terpilih siap mendukung pengembangan Gedung MUI HSU kedepan agar nanti kebermanfaatannya bisa lebih luas.

Kabupaten HSU merupakan daerah yang kental dengan nuansa religi dan menjunjung tinggi adat istiadat, tentulah dengan keberadaan MUI ini bisa menaungi keberagaman umat, untuk itu H. Sahrujani siap mendukung program-program yang dijalankan pemerintah terdahulu dalam membangun daerah

### **Sumber Berita**

1. <https://banjarmasin.tribunnews.com/2025/01/30/resmikan-gedung-mui-kabupaten-hsu-pj-bupati-dan-bupati-terpilih-kompak-harapkan-hsu-lebih-islami>, 30 Januari 2025.
2. <https://radarbanjarmasin.jawapos.com/banua/1975586808/pj-bupati-hsu-zakly-asswan-resmikan-gedung-baru-mui-hsu-dihadiri-bupati-dan-wabup-terpilih>, 30 Januari 2025.

### **Catatan Berita**

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah

#### **• Pasal 1**

1. Barang Milik Negara adalah semua barang yang dibeli atau diperoleh atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara atau berasal dari perolehan lainnya yang sah.
2. Barang Milik Daerah adalah semua barang yang dibeli atau diperoleh atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah atau berasal dari perolehan lainnya yang sah.
3. Penggunaan adalah kegiatan yang dilakukan oleh Pengguna Barang dalam mengelola dan menatausahakan Barang Milik Negara/Daerah yang sesuai dengan tugas dan fungsi instansi yang bersangkutan.
4. Pemanfaatan adalah pendayagunaan Barang Milik Negara/Daerah yang tidak digunakan untuk penyelenggaraan tugas dan fungsi Kementerian/Lembagalsatuan kerja perangkat daerah dan/atau optimalisasi Barang Milik Negara/Daerah dengan tidak mengubah status kepemilikan.
5. Sewa adalah Pemanfaatan Barang Milik Negara/Daerah oleh pihak lain dalam jangka waktu tertentu dan menerima imbalan uang tunai.

6. Pinjam Pakai adalah penyerahan Penggunaan barang antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah atau antar Pemerintah Daerah dalam jangka waktu tertentu tanpa menerima imbalan dan setelah jangka waktu tersebut berakhir diserahkan kembali kepada Pengelola Barang/Pengguna Barang.